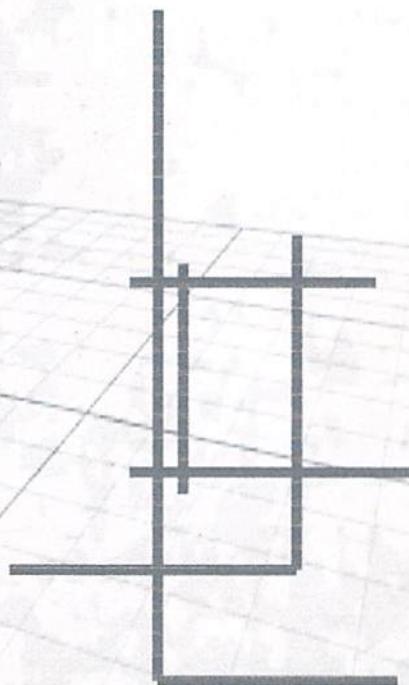


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
2011



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
JALAN VETERAN 45 LAMONGAN**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan syukur atas rahmat dan hidayah Allah SWT, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2011 dapat terselesaikan. Dasar dari penyusunan LAKIP adalah Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan menggunakan format Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29 tahun 2010.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada dasarnya merupakan wujud dari pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan di daerah dalam setiap tahun anggaran berjalan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Tahunan (Renja) BPBD Kabupaten Lamongan dan RPJMD Kabupaten Lamongan 2010-2015.

Dengan adanya penyusunan LAKIP ini diharapkan adanya tolak ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terutama dalam segi penggunaan dana, baik dari APBD Kabupaten maupun APBD Propinsi serta APBN.

Semoga LAKIP ini dapat memberikan manfaat bagi aparatur di lingkungan BPBD khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2012

**Pit. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**



**SUPRPTO, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19611118 198303 1 012



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
1.2.1 SDM Tanggap Darurat Bencana .....	4
1.2.2 SDM BPBD Kabupaten Lamongan.....	5
1.2.3 Peralatan Penanggulangan Bencana.....	6
1.3 Analisis Perkembangan Startegis.....	7
<b>BAB II    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.1.1 Visi dan Misi.....	9
2.1.2 Tujuan.....	10
2.1.3 Sasaran.....	10
2.2 Rencana Kinerja.....	11
2.2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran.....	11
2.2.2 Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan.....	11
2.3 Perjanjian Kinerja.....	12
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>13</b>
3.1 Pengukuran Kinerja.....	13
3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	14
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	16
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>18</b>
4.1 Kesimpulan.....	18
4.2 Saran.....	19
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN :</b>	
1.    FORM RENCANA STRATEGIS (RS)	



2. FORM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
3. FORM PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan capaian kinerja selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2011 yang digunakan untuk menguji keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi Pemerintah, menyajikan prosentase tingkat pencapaian kinerja kegiatan (menguji keberhasilan kinerja kegiatan/program) dan prosentase tingkat pencapaian sasaran (menguji pengukuran kinerja dinas/instansi dalam menjalankan Renstra BPBD yang berarti tugas, pokok dan fungsi BPBD).

Rencana Kerja BPBD pada tahun anggaran 2011, meliputi 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran. Untuk mendukung keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut telah dianggarkan plafon dana dari APBD sebesar Rp. 108.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 107.900.000,-. Kelebihan anggaran sebesar Rp.100.000,- kembali ke Kas Daerah. Sedangkan capaian indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran tersebut telah terealisasi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99.95 %.

Untuk mendukung tingkat keberhasilan program kerja di BPBD Kabupaten Lamongan, upaya-upaya yang perlu lebih ditingkatkan di tahun mendatang adalah:

1. Lebih meningkatkan dukungan dan kerjasama dari instansi terkait dan pihak legislatif demi kelancaran pendanaan program sehingga kegiatan dapat terselenggara seoptimal mungkin.
2. Lebih meningkatkan koordinasi antar instansi / SKPD dalam hal penyusunan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Lamongan.
3. Menampung dan menindaklanjuti setiap masukan/aspirasi dan kritik dari masyarakat yang menyangkut peningkatan kinerja SKPD demi terwujudnya Good Governance dengan menyesuaikan anggaran yang ada.
4. Lebih meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang ada terutama di bidang penanggulangan bencana melalui Diklat teknis baik yang dilakukan di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan sebagai salah satu lembaga di daerah yang melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki peranan yang cukup strategis dalam menentukan arah dan kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Penataan kelembagaan dan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 tahun 2010 dan Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

### **1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD**

Unsur Pelaksana BPBD berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD yang secara Ex-Office dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Unsur Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan Penanggulangan Bencana yang meliputi Pra Bencana, saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana secara terintegrasi.

Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana termasuk Bencana Kebakaran.
- c. Pedoman penyusunan Operasional terhadap Penanggulangan Bencana.
- d. Penyampaian Informasi kegiatan Penanggulangan Bencana pada Masyarakat.
- e. Penggunaan dan Pertanggung jawaban sumbangan / bantuan.



**f. Pelaporan Penanggulangan Bencana.**

Sedangkan unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pengkoordinasian
- b. Pengomandoan
- c. Pelaksana.

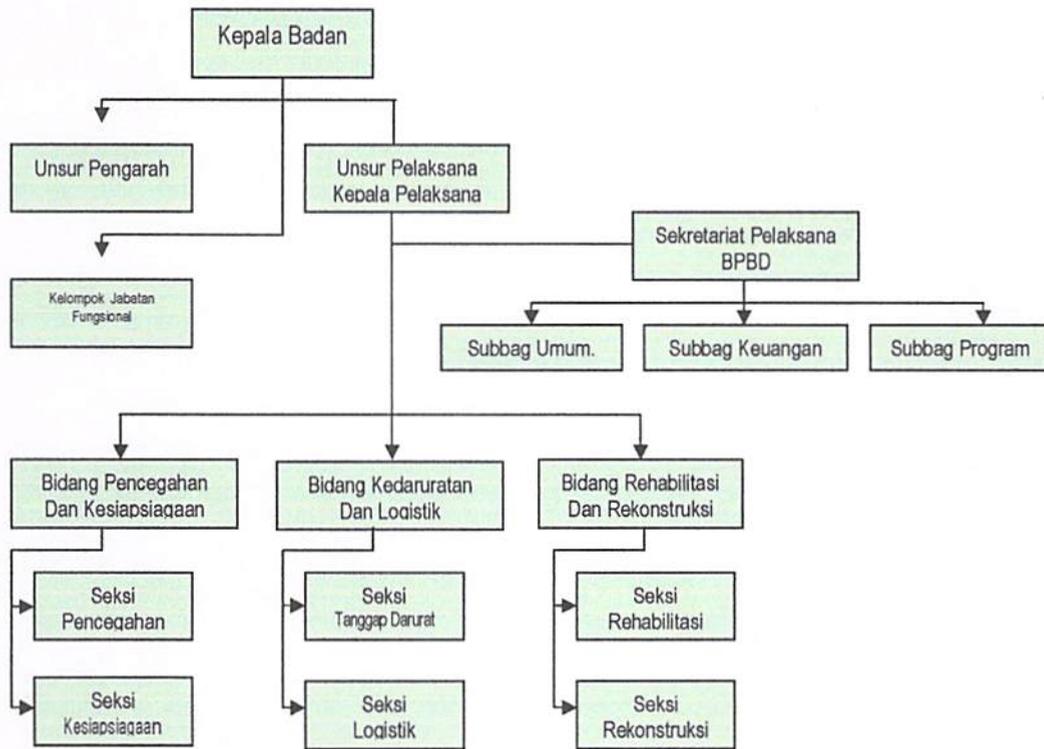
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 1 tahun 2010 tanggal 14 Januari 2010, maka bersama ini disajikan Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana
  - (1). Unsur Pengarah terdiri dari :
    - a. Pejabat Pemerintah Daerah
    - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli
  - (2). Unsur Pengarah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - (3). Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
  - (4). Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
    - a. Kepala Pelaksana
    - b. Sekretariat, membawahi :
      - 1) Sub Bagian Umum
      - 2) Sub Bagian Keuangan
      - 3) Sub Bagian Program
    - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
      - 1) Seksi Pencegahan
      - 2) Seksi Kesiapsiagaan
    - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
      - 1) Seksi Tanggap Darurat
      - 2) Seksi Logistik
    - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
      - 1) Seksi Rehabilitasi
      - 2) Seksi Rekonstruksi
4. Kelompok Jabatan Fungsional



### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN





### 1.2.1 SDM Tanggap Darurat Bencana

Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lamongan terdiri dari SKPD, TNI/ POLRI dan lembaga non pemerintah/relawan kemanusiaan lainnya. Dalam Upaya kesiapsiagaan bencana BPBD Kabupaten Lamongan selalu mengembangkan Kapasitas Relawan melalui Pelatihan – pelatihan, Sosialisasi dan Simulasi Penanganan Bencana, baik dilaksanakan sendiri maupun dalam bentuk Kerjasama dengan LPBI NU, LPB PDM dalam bentuk pelatihan Pengurangan Resiko Bencana, ESDM Prov Jatim dalam bentuk sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat daerah rawan bencana. Yang kegiatannya dilaksanakan di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun sampai Nasional .

Data Sumberdaya Manusia Tanggap Darurat Kabupaten Lamongan adalah, sebagai berikut :

#### KAPASITAS PERSONIL

Dinas Sosial	Dinas Kesehatan (Tng.Medic)	TNI	POLRI	BINA MARGA	CIPTA KARYA	PMI	TAGANA	SAR/ TRC	Linmas	ORARI/RAPI	KET
12	Menyesuaikan				15	30	100	30	825	25	TNI/POLRI Cipta Karya, Binamarga, Kesehatan. Menyesuaikan



### 1.2.2 Sumber Daya Manusia(SDM) BPBD Kabupaten Lamongan :

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3
1.	<b>SUPRAPTO, SH</b> 19611118 198303 1 012	PIL. KEPALA PELAKSANA
2.	<b>JUMALI, S Sos, MM</b> 19590907 198308 1 003	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
3.	<b>Drs. MAHMUD, Msi</b> 19660615 199503 1 004	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
4.	<b>AHMAD SULIKAN, SH. MH</b> 19601225 198802 1 001	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
5.	<b>SUKRISNO, SH. Msi.</b> 19590912 198508 1 003	KASI TANGGAP DARURAT
6.	<b>SUDARTO, SH</b> 19560606 198003 1 051	KASI PENCEGAHAN
7.	<b>Drs. BAMBANG DERAJAT HENDRANINGRAT</b> 19670423 199602 1 011	KASI KESIAPSIAGAAN
8.	<b>SRINING, SE</b> 19660201 199602 2 001	KASUBBAG. KEUANGAN
9.	<b>SEKAR, SH</b> 19660312 199703 1 004	KASI LOGISTIK
10.	<b>SUEB, SH. MM</b> 19630118 198603 1 009	KASI REHABILITASI
11.	<b>DAH ISMAWATI</b> 19650314 198603 2 015	KASUBBAG. PROGRAM
12.	<b>AMRIH SUTRISNO, SH</b> 19670712 199003 1 017	KASUBBAG. UMUM
13.	<b>GUNAWAN, SE</b> 19690626 200604 1 006	KASI REKONTRUKSI
14.	<b>ISKANDAR, SE</b> 19700730 199203 1 007	Staf
15.	<b>AE SUGIATNO</b> 19600212 198603 1 025	Staf
16.	<b>SRI SUKARTI, SE</b> 19640217 198910 2 002	Staf
17.	<b>AINIS YUNITA DEWI, SE</b> 19840604 200901 2 006	Staf
18.	<b>DWI FEBRI ERIYANTO, ST</b> 19830210 201001 1 005	Staf
19.	<b>MOHAMAD TIKNO</b> 19720125 200701 1 016	Staf
20.	<b>SLAMET PRAMONO</b> 19770530 200801 1 012	Staf
21.	<b>EDY KARYONO</b> 19740712 200604 1 013	Staf
22.	<b>ANANTA YUDHI PRASETYA</b>	Staf
23.	<b>AGUS SUTOMO</b>	Petugas Kebersihan
24.	<b>LILIK MURTOMO</b>	Ketugas Keamanan
25.	<b>MOH. FARID NUR CAHYO</b>	Ketugas Keamanan



### 1.2.3 Peralatan Penanggulangan Bencana :

No.	Nama Barang	Merk	Jumlah	Tahun Pembelian	Keterangan
1.	Genset	Yanmar 40 PK	1 Unit	2007	
	Genset	Yokohama 7500 E	5 Unit	2008	
	Genset	Nojiwa EC 500	2 Unit	2008	
2.	Perahu Karet		1 Unit	1989	Rusak
	Perahu Karet		1 Unit	1992	Rusak
	Perahu Karet		1 Unit	2007	
	Perahu Karet		1 Unit	2008	
	Perahu Karet		2 Unit	2008	Hibah Bakomas
	Perahu Karet		2 Unit	2009	Bantuan BNPB
	Perahu Fiber		1 Unit	2003	
	Perahu Fiber & Mesin	Yamaha 25 Pk	1 Unit	1998	Dipinjam PU Pengairan
3.	Mesin Perahu Karet	Yamaha 25 PK	1 Unit	1989	
	Mesin Perahu Karet	Yamaha 25 Pk	1 Unit	1992	
	Mesin Perahu Karet	Mercury 40 PK	1 Unit	2007	
	Mesin Perahu Karet	Mercury 40 PK	1 Unit	2009	
	Mesin Perahu Karet	Yamaha 40 PK	1 Unit	2009	Hibah Bakomas
	Mesin Perahu Karet	Suzuki 25 PK	1 Unit	2009	Bantuan BNPB
4.	Gergaji Chainsaw	Stail	2 Unit	2007	
	Gergaji Chainsaw	Husqvarna	1 Unit	2006	Rusak
5.	Veibet	Kain Motho	10 Buah	2008	
	Veibet	Kain Motho	3 Buah		Rusak
	Veibet	Kain Motho	30 Buah		Bantuan BNPB
6.	Tenda Dapur	Kain Motho	1 Unit	2003	
	Tenda Karvas	Kain Motho	3 Unit	2009	
	Tenda Keluarga	Kain Motho	15 Unit	2009	
	Tenda Regu	Kain Motho	5 Unit	2009	
	Tenda Pleton	Kain Motho	2 Unit		
7.	Pelampung regu		1 Buah		
	Pelampung Bulat		4 Buah		
	Pelampung		42 Buah		
8.	Lampu Neon	Phillips 20 W	40 Buah		
9.	Mega Phone	Toa	2 Buah		
10.	Peralatan Dapur				
	Gilingan Bumbu		1 Buah		
	Kompas Gas		5 Buah		
	Dandang 20 Kg		4 Buah		
	Dandang 8 Kg		1 Buah		
	Dandang 5 Kg		1 Buah		
	Panci Besar		3 Buah		
	Piring Besar		35 Buah		
	Piring		24 Buah		
	Cangkir		60 Buah		
	Sendok Nasi		14 Buah		
	Wajan		2 Buah		
Tempat Nasi		4 Buah			



### 1.3 Analisis Perkembangan Strategis

Pemanasan global dan perubahan iklim tengah terjadi, dan diperkirakan akan terus terjadi pada masa mendatang. Banyaknya kejadian bencana seperti banjir, longsor, erosi, badai tropis, dan kekeringan merupakan dampak nyata perubahan iklim dan pemanasan global. Agenda adaptasi terhadap dampak perubahan iklim diperlukan untuk menciptakan sistem pembangunan yang berdaya tahan (reliance) terhadap guncangan variabilitas iklim saat ini (anomali iklim), danantisipasi dampak perubahan iklim di masa depan. Fokus adaptasi ini perlu ditujukan pada area-area yang rentan terhadap perubahan iklim seperti sumber daya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan permukiman, kesehatan, dan kehutanan.

Arah kebijakan pembangunan yang berdaya tahan terhadap risiko perubahan iklim pada masing-masing fokus area perlu mempertimbangkan agenda perubahan iklim terkait tujuan pembangunan nasional dan daerah serta diselaraskan tujuan pembangunan millineum (Millineum Development Goals/MDG's). Beberapa isu mendarat yang layak menjadi perhatian pada setiap fokus area adalah yang berkaitan usaha penanggulangan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan sosial, Investasi dan perencanaan tata ruang. Pada tahun-tahun terakhir ini berbagai implikasi dari perubahan iklim telah membuat derita para miskin menjadi berlipat ganda. Para nelayan tidak bisa melaut karena gelombang besar, lahan pertanianpun terancam banjir kala musim penghujan, dan terancam kekeringan saat kemarau.

Untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tengah dan diperkirakan akan terus terjadi ini, upaya penegakan hukum yang konsisten dan tegas, tata kelola pemerintahan yang baik (good governace), persiapan, dan rekayasa sosial, serta sosialisasi dan pendidikan yang intensif, menjadi prasyarat penting yang harus dipenuhi menjadi kebijakan yang lebih komprehensif.

Penanggulangan bencana agar dapat berhasil maksimal harus tanggap terhadap kondisi di daerah. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala meliputi :

- Pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.

Intensitas sosialisasi terhadap masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan kalangan swasta terhadap kebencanaan perlu



ditingkatkan. Dengan demikian pengelolaan bencana menjadi baik termasuk juga dalam hal kesiapsiagaan.

- Kesiapan petugas dan sarana-prasarana penanggulangan bencana.

Peningkatan kemampuan sumber daya penanggulangan bencana, SAR, TNI, Polri, TRC, Tenaga Medis, perangkat Orari dan lain-lain dengan pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan simulasi sangat diperlukan. Demikian juga peralatan penanggulangan bencana yang saat ini tersedia membutuhkan perawatan untuk efektifitas penggunaan dalam kejadian bencana.

- Ketersediaan material dan logistik penanggulangan bencana.

Dalam keadaan darurat ketersediaan dan pengiriman yang cepat dan tepat material bencana : Glangsing, Gedek, bongkolan dan dolken mutlak diperlukan agar kejadian bencana bisa diminimalisir dan tidak meluas. Untuk para korban bencana kecukupan logistik bencana(beras, minyak goreng, kecap dan mie instan) yang terkirim dengan cepat bisa mengurangi penderitaan para korban bencana.

- Penanganan pasca bencana

Rekonstruksi dan Rehabilitasi sarana-parasarana yang rusak akibat bencana membutuhkan penanganan yang terpadu antar instansi terkait di tingkat Kabupaten, BPBD Provinsi dan BNPB.



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

#### 2.1.1 Visi dan Misi

Dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan visi Kabupaten Lamongan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan, maka BPBD menetapkan visi sebagai berikut :

**"Terwujudnya Ketangguhan dan Kebersamaan Masyarakat Lamongan Dalam Menghadapi Bencana"**

Visi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk menghadapi bencana dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (multi stake holder), institusi vertikal maupun horisontal dalam rangka Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terkoordinir, terpadu dan menyeluruh.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan mengemban Misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan Pemerintahan serta partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamongan ;**
- 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan, Koordinasi dan Komando dalam Penanggulangan Bencana ;**
- 3. Meminimalkan Korban Jiwa dan Kerugian Harta Benda yang diakibatkan terjadinya Bencana.**



### 2.1.2 Tujuan

Rencana strategis BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan merupakan tolak ukur (indikator) kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Organisasi.

Tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2010-2015 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kemampuan kelembagaan pemerintahan serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- Meningkatnya pelaksanaan tanggap darurat bencana dan ketersediaan logistik dan sarana prasarana penanggulangan bencana.
- Minimalnya korban jiwa dan kerugian harta benda serta terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang diakibatkan terjadinya bencana.

### 2.1.3 Sasaran

Sasaran yang dituju adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya Kelembagaan pemerintahan yang tangguh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- Meningkatnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- Terlaksananya tanggap darurat bencana yang efektif, terpadu dan tepat waktu.
- Tersedianya logistik dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang mencukupi.
- Meningkatnya efektifitas sektor ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat pasca bencana.
- Terwujudnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan yang akuntable dan tepat waktu.



## 2.2 Rencana Kinerja

### 2.2.1 Sasaran dan Indikator Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rencana kinerja tahun 2011 antara lain :

- Terwujudnya Kelembagaan pemerintahan yang tangguh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dengan indikator sasaran % peningkatan kelembagaan pemerintahan yang tangguh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- Tersedianya logistik dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang mencukupi dengan indikator % Tersedianya logistik dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang mencukupi.
- Terwujudnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan yang akuntable dan tepat waktu dengan indikator % Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana yang akuntable dan tepat waktu.

### 2.2.2 Program, kegiatan dan indikator kegiatan

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2011, dituangkan dalam **Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam,**  
*dengan kegiatan :*

1. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam dengan indikator kegiatan Jumlah material/bahan penanggulangan bencana yang tersedia.
2. Monitoring dan evaluasi pasca bencana dengan indikator kegiatan % terlaksananya Monitoring dan evaluasi pasca bencana
3. Pembekalan ketrampilan bagi Tim Reaksi Cepat dengan indikator kegiatan Jumlah personil TRC yang terdidik dan terlatih.



### **2.3 Perjanjian Kinerja**

Sebagai SKPD baru secara definitif SKPD BPBD Kabupaten Lamongan berdiri pada tanggal 20 Januari 2011 ketika personil BPBD mulai terisi, sedangkan efektif berjalan mulai bulan Pebruari 2011 oleh karena itu Penetapan Kinerja tahun 2011 tidak ada, dan pelaksanaan kegiatan mengacu pada APBD tahun 2011 yang merupakan pemisahan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Lamongan.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan performansi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen BPBD, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian Indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam renstra.

#### 3.1 Pengukuran Kinerja

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh *stakeholder*. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian Pemerintah Kabupaten untuk pengambilan keputusan strategis agar berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengemban amanat dan pemberi amanat. Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja *input*, *output* dan *outcome*. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja *outcome* belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya.

Indikator kinerja *input* yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator *output* yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti orang, buku, desa, Kecamatan,



kelompok, buah. Seperti juga pada indikator *output*, indikator kinerja *outcome* yang digunakan juga bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian, terdapat satu kesamaan dalam merumuskan indikator kinerja *outcome* maupun *output* ini, yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauhmana tingkat prestasi BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Untuk mengukur dan menganalisa hasil kinerja BPBD Kabupaten Lamongan, maka pada saat penyusunan Rencana Kerja pada awal tahun telah ditetapkan standar pencapaian skala pengukuran ordinal dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran dan hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**

No.	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	85 sampai dengan 100	Sangat berhasil
2	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup
4	Kurang dari 55	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Adapun analisa Capaian masing-masing indikator kinerja sasaran BPBD Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :



1. Sasaran 1, Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang tangguh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.  
Untuk mencapai sasaran tersebut tahun 2011 dilaksanakan program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana, dengan kegiatan Pembekalan ketrampilan bagi Tim Reaksi Cepat (TRC).  
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan memberikan pelatihan untuk memberikan bekal ketrampilan bagi 30 anggota TRC dengan target sasaran 90% dan telah memenuhi target kegiatan sebesar 100%.
2. Sasaran 2, Tersedianya logistik dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang mencukupi.  
Untuk mencapai sasaran tersebut tahun 2011 dilaksanakan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan kegiatan :  
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam.  
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan melakukan pengadaan material/bahan baku bangunan untuk penanggulangan bencana berupa : glangsing 10.000 lbr, gedek ukuran 2x3 100 lbr, bongkotan 250 btg dan dolken 50 btg. Dengan target sasaran 25% dan telah memenuhi target kegiatan 99,78%
3. Sasaran 3, Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulan bencana yang akuntabel dan tepat waktu.  
Untuk mencapai sasaran tersebut tahun 2011 dilaksanakan program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana, dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi pasca bencana.  
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk mengevaluasi dan mengumpulkan data bencana banjir di 8 kecamatan di Kabupaten Lamongan dengan target sasaran 80%, dan telah memenuhi target kegiatan 100%.

Dengan analisa capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut diatas maka tingkat keberhasilan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang tangguh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sangat berhasil.



2. Tersedianya logistik dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang mencukupi sangat berhasil.
3. Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana yang akuntabel dan tepat waktu sangat berhasil.

### **3.3 Akuntabilitas keuangan**

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), mengingat alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan sebagaimana dalam APBD 2011, pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban BPBD Kabupaten Lamongan. Namun demikian analisis capaian kinerja efisiensi harus dilakukan untuk mendukung prinsip-prinsip penganggaran.

Belanja BPBD Kabupaten Lamongan tahun 2011 dalam melaksanakan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar Rp. 108.000.000,-

Dari target tersebut pada tahun 2011 direalisasikan belanja sebesar Rp. 107.900.000,- atau tercapai sebesar 99,78%

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan. Demikian juga untuk mengukur seberapa besar tupoksi yang telah dilaksanakan dapat diketahui dari sasaran yang telah ditetapkan. Perincian dana yang dialokasikan dan realisasinya dalam mewujudkan pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2011, adalah sebagai berikut :



**Tabel : Data Pencapaian Sasaran  
BPBD Kab. Lamongan Tahun 2011**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang tangguh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	10.000.000,-	10.000.000,-	100
2.	Tersedianya logistik dan sarana prasarana penanggulangan bencana.	83.000.000,-	82.900.000,-	99,78
3.	Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana yang akuntabel dan tepat waktu.	15.000.000,-	15.000.000,-	100
	<b>Jumlah</b>	<b>108.000.000,-</b>	<b>107.900.000,-</b>	<b>99,95</b>

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa dari 3 ( tiga ) capaian sasaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan rata-rata sebesar 99,95%, yaitu dari dana sebesar Rp. 108.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 107.900.000,-. Sisa dari alokasi anggaran sebesar Rp.100.000,- atau 0,05% kembali ke Kas Daerah.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bencana daerah telah dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan (time schedule) dan hasil (outcome) yang diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD Kabupaten maupun BNPB dan BPBD Propinsi, baik kegiatan yang bersifat rutin maupun pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran, yakni efektif dan efisiensi.

Dari analisa capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- ❖ Keberhasilan kinerja bidang penanggulangan bencana daerah, dapat dihitung dari jumlah prosentase pencapaian tingkat sasaran (lampiran PPS) dibandingkan dengan jumlah sasaran yang ditetapkan. Jika diasumsikan, bahwa pencapaian kinerja adalah PK, prosentase pencapaian sasaran adalah PPS dan sasaran adalah S, maka perhitungan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$PK = \text{Jumlah \% Pencapaian Target Sasaran} / \text{Jumlah total Indikator Sasaran} = 99,95 \%$$

Pencapaian kinerja tersebut masuk dalam skala nilai 85 – 100 dengan predikat sangat baik/sangat berhasil, sehingga seluruh program/kegiatan yang terlaksana pada bidang penanggulangan bencana daerah dapat mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Lamongan.

- ❖ Dari segi anggaran Tahun 2011, plafon dana yang disediakan untuk Belanja baik Belanja Langsung maupun Tidak Langsung sebesar Rp. 780.917.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 780.817.000,- Sisa dari alokasi anggaran sebesar Rp.100.000,- atau 0,05% kembali ke Kas Daerah.



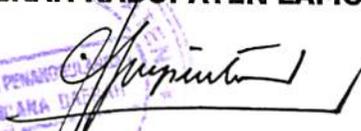
## 4.2 Saran

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja yang telah dicapai, diperlukan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Lamongan. Upaya-upaya yang perlu lebih ditingkatkan agar pelaksanaan di tahun mendatang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan dukungan dan kerjasama dari instansi terkait dan pihak legislatif demi kelancaran pendanaan program sehingga kegiatan dapat terselenggara seoptimal mungkin.
2. Lebih meningkatkan koordinasi antar instansi / SKPD dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Menampung dan menindaklanjuti setiap masukan/aspirasi dan kritik dari masyarakat yang menyangkut peningkatan pembangunan sarana umum demi terwujudnya Good Governance dengan menyesuaikan anggaran yang ada.
4. Lebih meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang ada terutama di bidang penanggulangan bencana melalui Diklat baik yang dilakukan di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun Nasional.

Demikian laporan ini disusun, semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk dan bimbinganNya kepada kita semua. Amiin

**Pit. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**



**SUPRPTO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19611118 198303 1 012**

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.000,00)										Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
										2011		2012		2013		2014		2015				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			1.19.	1.19.	03.22	.	Penyusunan kajian mitigasi bencana	Teselesainya penyusunan kajian mitigasi bencana		100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	BPBD	lmg
			1.19.	1.19.	03.22	.09	Sosialisasi/simulasi Penanggulangan Bencana	Tertaksananya Sosialisasi/simulasi Penanggulangan Bencana		90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	BPBD	kec



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja pada akhir periode					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.19.03.22.03	Pengadaan sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dan ancaman korban bencana alam	Jumlah material/sarana dan prasarana evakuasi					90%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	BPBD	lmg
			1.19.03.22.11	Pengadaan bahan baku material/sarana untuk dan prasarana penanggulangan bencana alam	Jumlah material/sarana untuk dan prasarana penanggulangan bencana alam					90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	BPBD	lmg
			1.19.03.22	Peralatan untuk penanggulangan bencana	Jumlah peralatan untuk penanggulangan bencana yang terdistribusi					90%	20.000.000	90%	20.000.000	90%	20.000.000	90%	20.000.000	90%	20.000.000	90%	BPBD	lmg

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

Misi III : Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang diakibatkan terjadinya bencana

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana	Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										2011		2012		2013		2014		2015						
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Minimalnya korban jiwa dan kerugian harta benda serta terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana dasar (Infrastruktur dan utilitas) yang diakibatkan terjadinya bencana.	Meningkatnya efektivitas sektor ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat pasca bencana.	Presentase Meningkatnya efektivitas sektor ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat pasca bencana.	1.19.	1.19.	03.22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terlaksananya Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam																
	Tenajudnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana yang akuntable dan tepat waktu.	Presentase Tenajudnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana yang akuntable dan tepat waktu.	1.19.	1.19.	03.22		- Bantuan modal usaha korban bencana	Jumlah korban bencana yang terbantu usahanya	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	BPBD	kec	
			1.19.	1.19.	03.22		- Bantuan pemukiman rumah penduduk korban bencana	Jumlah rumah penduduk korban bencana yang terbantu dalam pemulihannya	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	BPBD	lmg	
1.19.	1.19.	03.22	.10			- Monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana.	Terlaksananya monev. penanggulangan bencana	90%	60.000.000	90%	60.000.000	90%	60.000.000	90%	60.000.000	90%	60.000.000	90%	60.000.000	90%	BPBD	kec		

**RENCANA KERJA TAHUNAN  
TAHUN 2011**

**INSTANSI : BPBD**

No.	Urusan	Rencana Kerja BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2011							Estimasi Biaya
		Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan/Sasaran			
						Kebijakan	Program	Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Mewujudkan ketangguhan dan kebersamaan masyarakat Lamongan dalam menghadapi bencana.	<p>1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintahan serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Lamongan</p> <p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana, pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan</p> <p>3. Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang diakibatkan terjadinya bencana.</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintahan serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.</p> <p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam tanggap darurat penanggulangan bencana.</p> <p>3. Minimalnya korban jiwa dan kerugian harta benda serta terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana</p>	<p>1. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang tangguh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.</p> <p>2. Meningkatnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.</p> <p>3. Terlaksananya tanggap darurat bencana yang efektif, terpadu dan tepat waktu.</p> <p>4. Tersedianya logistik dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang mencukupi</p> <p>5. Meningkatnya efektifitas sektor ekonomi, sosial dan</p>	<p>1. Mengurangi resiko bencana.</p> <p>2. Memobilisasi kemampuan masyarakat dan lembaga lain pada masa krisis akibat bencana.</p> <p>3. Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikis.</p>	<p>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</p>	<p>1. Optimalisasi Tugas TRC.</p> <p>2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanggulangan Bencana.</p> <p>3. Pengadaan sarana dan prasarana/material bencana alam.</p>	<p>Rp. 10.000.000,00</p> <p>Rp. 15.000.000,00</p> <p>Rp. 83.000.000,00</p>

No.	Urusan	Rencana Kerja BPBD Kabupaten Lamongan Tahun 2011							Estimasi Biaya
		Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan/Sasaran			
						Kebijakan	Program	Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas) yang diakibatkan terjadinya bencana.	kesehatan masyarakat pasca bencana. 6. Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan yang akuntable dan tepat waktu.				

**PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2011**

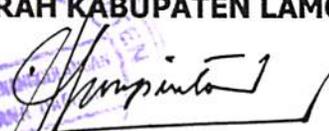
**Instansi : BPBD**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang tangguh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.	% peningkatan kelembagaan pemerintahan yang tangguh dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.	10.000.000,-	10.000.000,-	100
2.	Tersedianya logistik dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang mencukupi.	% Tersedianya logistik dan sarana prasarana penanggulangan bencana yang mencukupi.	83.000.000,-	√ 83.000.000,-	99,78
3.	Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulungan bencana yang akuntable dan tepat waktu.	% Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulungan bencana yang akuntable dan tepat waktu.	15.000.000,-	15.000.000,-	100

Jumlah Anggaran tahun 2011 sebesar Rp. 108.000.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan tahun 2011 sebesar Rp. 107.900.000,- atau 99,95%.

**Pt. KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

  
**SUPRPTO, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19611118 198303 1 012